

RENCANA KERJA 2023



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BKN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**DEPUTI
BIDANG
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BKN yang memuat visi, misi, sasaran strategis, program, kegiatan, dan perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun 2023 maupun prakiraan kedepannya.

Penyusunan Renja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Perumusan Renja dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian agar kinerja pada tahun 2023 dapat terlaksana secara lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renja, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu satu tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata, Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara secara umum dan secara khusus Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian



Ditandatangani Secara Elektronik
Dr. OTOK KUSWANDARU, S.Sos., M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	1
Tujuan	3
Ruang Lingkup	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Deputy Bidang Wasdal 2021.....	4
Visi dan Misi	4
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021.....	7
IEvaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2021.....	8
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	11
Kebijakan Nasional Tahun 2023	13
Program Prioritas Nasional Tahun 2023	15
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023.....	17
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023.....	17
Target Reform Tahun 2023.....	17
BAB. IV. PENUTUP	18
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

WASDAL

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia terus merespon dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah. Dokumen RKP Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tema RKP Tahun 2023 adalah **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu secara substantif RKP disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Perumusan tema dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah arahan presiden dan hasil evaluasi. Perumusan tema juga dilakukan dengan menjangkau usulan publik melalui forum konsultasi publik dengan tetap memperhatikan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema juga memperhatikan berbagai isu strategis, dinamika pandemi COVID-19, dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selaras dengan tema tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam (1) kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh PN RKP Tahun 2023 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan kemandirian serta transformasi pelayanan publik. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis *Major Project (MP)* sebagai *leverage point* yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PN.

Besarnya skala dan cakupan kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, juga membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2023 juga dilakukan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan.

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Badan Kepegawaian Negara, khususnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian perlu melakukan penyesuaian kembali perubahan rencana kerjanya dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan guna menyelaraskan program pembangunan pemerintah pada tahun 2023.

LANDASAN HUKUM

WASDAL

LANDASAN HUKUM

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8.Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 9.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
- 12.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 15.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 20.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2023 meliputi:

1. evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021; dan
2. rencana kerja 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

WASDAL

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Rencana kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan kendali terhadap perencanaan kinerja pada tahun berjalan.

TUJUAN

Rencana kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi unit kerja di bawahnya yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

WASDAL

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia mengusung tema pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Gagasan tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN. Salah satu agenda tersebut ialah melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola. Agenda tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Guna menyukseskan agenda tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah dengan melakukan penguatan implementasi manajemen ASN melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN dan peningkatan profesionalitas ASN. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transformasi pelayanan publik berbasis elektronik juga dicanangkan dalam arah kebijakan lima tahun mendatang.

VISI

Dalam mendukung hal tersebut, BKN mencanangkan visi **"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. **Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan;**
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

TUJUAN

Penjabaran misi ke-4 BKN yaitu “Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN” yang didelegasikan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian dituangkan dalam suatu tujuan tertentu agar kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian menjadi fokus dan terukur. Adapun misi keempat BKN tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah baik buruknya tingkat implementasi NSPK manajemen ASN di instansi pemerintah. Indikasi tercapainya tujuan ini diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Diharapkan pada akhir periode renstra ini, seluruh instansi pemerintah telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan penyelenggaraan manajemen ASN di instansi pemerintah berjalan sesuai NSPK. Hal ini akan mendorong transformasi pelayanan publik kearah yang lebih netral dan profesional.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 1. PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN ASN SESUAI NSPK

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
5%	20%	40%	100%	8%	34%	34%

Persentase Instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria merupakan Indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam *stakeholder perspective* yang diukur dalam indeks implementasi NSPK Manajemen ASN. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN merupakan bentuk kolaborasi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh auditor kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Pusat dan auditor kepegawaian yang tersebar di Kantor Regional I s.d. XIV BKN. Pengawasan dan Pengendalian ini dilakukan terhadap 616 instansi pemerintah yang terdiri dari 542 instansi pemerintah daerah dan 74 instansi pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian, jumlah instansi yang dinilai telah mengimplementasikan sesuai NSPK atau bernilai minimal B berjumlah 204 instansi atau 33% dari jumlah instansi secara nasional.

KATEGORI	A	B	C	D	E	TIDAK DAPAT DINILAI	TOTAL
JUMLAH INSTANSI	66	138	119	112	179	2	616

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN antara lain sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Indeks NSPK Manajemen kepada instansi pemerintah
- Melakukan pemantauan secara kontinu terkait pengisian aplikasi Indeks NSPK
- Memperpanjang masa pengisian aplikasi Indeks NSPK
- Melakukan verifikasi terhadap eviden dokumen yang telah disampaikan oleh instansi

Selama proses pengawasan dan pengendalian melalui indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini terdapat kendala baik yang dialami oleh instansi pemerintah sebagai objek wasdal maupun dari sisi auditor kepegawaian yang melakukan evaluasi terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya terkait sarana dan prasarana teknologi informasi di sejumlah instansi daerah yang belum memadai. Selain itu permasalahan yang lain adalah keberadaan dokumen pendukung yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan pengumpulan eviden sulit dilakukan.

Sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan terutama terhadap instrumen dan pengembangan aplikasi Indeks 2.0. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian berkolaborasi secara intens dengan Auditor kepegawaian di kantor regional untuk melakukan upaya persuasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah yang masih memiliki nilai C, D, E. Kemudian Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga sedang mengkaji untuk melakukan pengunggahan dokumen pendukung sepanjang tahun sehingga dapat membantu instansi untuk mengumpulkan dokumen serta dapat membantu auditor kepegawaian untuk melakukan wasdal secara lebih optimal.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
85	86	87	95	83,39	86,04	86,04

Kegiatan survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan mengukur tingkat kepuasan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pengguna layanan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholders* yang dalam hal ini adalah instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil analisis terhadap data survei, diperoleh nilai sebesar 86,04 yang berarti pelayanan berada pada kategori BAIK. Berikut merupakan rincian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian:

NO	UNSUR SKM	NILAI UNSUR SKM	KATEGORI	PERINGKAT
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,380	B	6
2	Waktu Penyelesaian	3,3817	B	5
3	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,4128	B	4
4	Kompetensi Pelaksana	3,4452	B	3
5	Perilaku Pelaksana	3,5219	B	2
6	Sarana dan Prasarana	3,5500	A	1

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan terdapat beberapa saran perbaikan yang diinginkan oleh instansi pemerintah sebagai stakeholder antara lain:

1. Mengintegrasikan pengaduan dan instrumen lainnya bersama Kementerian PANRB, KASN dan LAN;
2. Pemberian rekomendasi diharapkan lebih spesifik dan detail;
3. Melakukan rapat koordinasi antara BKN dengan BKD/BKPSDM dan inspektorat untuk bisa meningkatkan fungsi pengawasan.
4. Menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian secara langsung kepada PPK serta PyB ;
5. Sosialisasi dilaksanakan sejak awal tahun sehingga instansi lebih siap dalam menyampaikan dokumen pendukung.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain

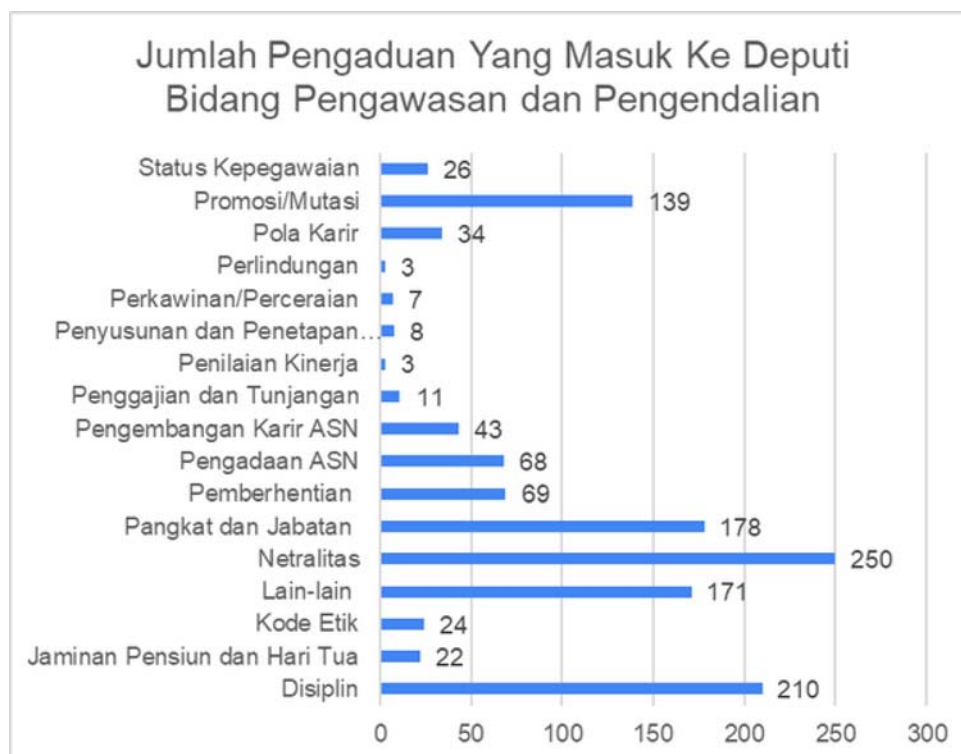
- Membentuk Person In Charge untuk setiap instansi;
- Melakukan koordinasi yang intens dengan PIC instansi mengenai permasalahan kepegawaian di instansinya;
- Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Indeks 2.0

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 3. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN ASN

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2021, jumlah pengaduan masyarakat kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian melalui saluran pengaduan baik surat atau aplikasi pengaduan sejumlah 1.266. Pengaduan paling banyak adalah pengaduan tentang netralitas sebanyak 250 pengaduan, disiplin sebanyak 210 pengaduan serta pangkat dan jabatan sebanyak 178 pengaduan. Jumlah pengaduan ini berkurang lebih dari 50% dibanding pengaduan yang masuk pada tahun 2022 yakni sebanyak 3.087 pengaduan. Kendala yang muncul dalam mewujudkan target Indikator kinerja ini adalah tidak adanya standar format pengaduan yang diterima oleh auditor kepegawaian sehingga menyulitkan mereka untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaduan yang masuk. Selain itu, kendala kedua yang muncul adalah belum meratanya kompetensi auditor kepegawaian di Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian terutama dalam penguasaan teknologi informasi.



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 4. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG DITINDAKLANJUTI

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
30	65	90	100	60	89	89

Pada tahun 2021, Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian menitikberatkan Wasdal NSPK pada 4 fokus yaitu Netralitas ASN, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Radikalisme yang muncul di kalangan Aparatur Sipil Negara serta kegiatan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara. Total Rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor kepegawaian untuk keempat permasalahan diatas mencapai 3.486 rekomendasi dan 89% atau 3.088 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi pemerintah. Capaian kinerja pada IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun 2020 yakni sebesar 60% rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh PPK

NO	KEGIATAN WASDAL	JUMLAH REKOMENDASI	TELAH DITINDAKLANJUTI PPK	%
1	NETRALITAS ASN	1.112	986	89%
2	PTDH ASN TIPIKOR	2.211	2.011	91%
3	RADIKALISME ASN	38	38	100%
4	PENGADAAN CASN	125	53	42%
TOTAL		3.486	3.088	89%

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

Kendala terbesar yang dihadapi oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk mendorong instansi pemerintah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dan pengendalian adalah tidak adanya sanksi bagi instansi pemerintah yang tidak mematuhi rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyusun draft Peraturan Presiden Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN yang mengatur mengenai instrumen sanksi berupa tindakan administratif. Namun demikian dikarenakan proses pengesahan draft Peraturan Presiden tersebut yang belum tuntas hal ini membuat lambatnya proses tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian oleh instansi pemerintah.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 5. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI LINGKUP KEDEPUTIAN BIDANG WASDAL

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
77	78	80	88	75,10	78,92	78,92

Pada tahun 2021, BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah merilis Laporan No. 02/LHE/SDM/XII/2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Mandiri Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan BKN. Berdasarkan laporan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memperoleh rata-rata nilai IP ASN sebesar 78,92 yang berarti tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian berada pada kategori SEDANG. Perolehan nilai ini telah melampaui target yang ditetapkan.



78,92

KUALIFIKASI : 16,95
KOMPETENSI : 30,93
KINERJA : 26,10
DISIPLIN : 4,93

Pada tahun 2021, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III menjadi unit kerja dengan nilai Indeks Profesionalitas tertinggi dengan nilai sebesar 81,18 dan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II menjadi unit kerja dengan nilai indeks profesionalitas terendah di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan nilai indeks 74,53.

Ada beberapa kendala yang menghambat rendahnya nilai indeks profesionalitas pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2021 antara lain adalah sinkronisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dikarenakan masih adanya proses alih data dari SAPK ke dalam SI ASN. Hal ini membuat data terkait peningkatan kompetensi dan kinerja belum dimutakhirkan secara maksimal. Selain itu, faktor lainnya adalah terbatasnya anggaran yang dapat digunakan oleh unit untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui *In House Training*. Oleh karena itulah, pada tahun 2022 ini, semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 6. PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI YANG TERSTANDAR

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100	100	100	100	95,10	100	100

Jumlah responden survei pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan melalui tautan s.id/surveySlwasdal2021 berjumlah 72 orang. Penilaian dihitung dari perolehan jumlah jawaban "YA" lalu dibagi jumlah responden dari setiap pertanyaan. Lalu hasil pembagian dari setiap pertanyaan tersebut dijumlahkan kembali dan dibagi jumlah pertanyaan dan dikalikan 100%. Pada tahun 2021, terdapat tambahan dua aplikasi yang ditanyakan dalam survei yakni i'Dis dan indeks implementasi NSPK manajemen ASN.

Apabila dilihat baik secara keseluruhan maupun dari setiap pertanyaan, pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah memanfaatkan seluruh sistem informasi yang terstandar di BKN termasuk aplikasi khusus yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti i'Dis dan indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Meskipun demikian, seluruh aplikasi tersebut akan senantiasa dikembangkan agar dapat memfasilitasi permintaan pengguna yang terus meningkat setiap waktunya. Telah dimanfaatkannya seluruh informasi yang terstandar tersebut merupakan indikasi terjadinya peningkatan pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi yang akan berimplikasi pada peningkatan kinerja.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 7. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Target				Realisasi		Capaian Renstra s.d. 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
30	33	34	36	32,74	34,12	34,12

Indikator ini merupakan kumulatif nilai dari seluruh area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN yakni area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Tahun 2021 adalah 34,12. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,38 poin dibandingkan pencapaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2020. Aspek penguatan akuntabilitas merupakan aspek yang mendapatkan nilai tertinggi dari delapan aspek perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan nilai maksimal 2,5. Pada area reform, penataan tata laksana menjadi salah satu area dengan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi tertinggi dengan 3,75.

Salah satu faktor dari peningkatan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah komitmen dari pimpinan tertinggi yakni Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan aspek pemenuhan reformasi birokrasi. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian terutama melalui aplikasi indeks NSPK juga menjadi salah faktor penting peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Namun demikian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga memiliki beberapa kendala antara lain adalah belum terselesaikannya beberapa peraturan terkait yang berfungsi mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian seperti Peraturan Presiden tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen aparatur sipil negara juga menjadi salah satu faktor yang menghambat reformasi dalam penataan tata laksana.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI			
ASPEK	SUB KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	BOBOT
Pemenuhan	Manajemen Perubahan	1,96	2
	Deregulasi Kebijakan	1	1
	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2
	Penataan Tatalaksana	1	1
	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,35	1,4
	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,5
	Penguatan Pengawasan	2,2	2,2
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,21	2,5
Total Aspek Pemenuhan Nilai		14,20	14,60
Reform	Manajemen Perubahan	3	3
	Deregulasi Kebijakan	1,5	2
	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,5	1,5
	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75
	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,75	2
	Penguatan Akuntabilitas	3,12	3,75
	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,34	3,75
Total Aspek Reform		20,32	21,70
Total		34,12	36,30

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 8. SKOR ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Target				Realisasi		Capaian Renstra S.d 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
70	75	79	85	70,19	74,56	75,56

Semenjak tahun 2019, skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengalami peningkatan secara signifikan, dari yang sebelumnya pada tahun 2019 senilai 64,85 (Kategori B) hingga pada tahun 2021 mencapai nilai 74,56 (Kategori BB). Pada tahun 2021, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan unit kerja dengan pencapaian tertinggi untuk skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara.

SKOR ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		
KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	BOBOT
Perencanaan Kinerja	25,06	30
Pengukuran Kinerja	19,58	25
Pelaporan Kinerja	11,83	15
Evaluasi Kinerja	5,94	10
Capaian Kinerja	12,15	20
Total	74,56	100

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

Pada aspek perencanaan, perencanaan kinerja Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian telah selaras dengan perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Negara, namun demikian belum ada monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perencanaan kinerja yang telah dibuat. Selain itu, capaian kinerja yang telah dilakukan belum menjadi pedoman bagi pemberian *reward and punishment*.

Pada aspek pengukuran kinerja, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam akuntabilitas kinerja adalah *cascading* kinerja telah dilakukan hingga penyusunan Sasaran kinerja pegawai di tingkat eselon I, eselon II, eselon IV dan staf. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memiliki *Standard Operational Procedure* untuk pengumpulan data kinerja dan tim khusus yang mengelola data kinerja pada unit kerja.

Pada aspek pelaporan, laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2021 telah menyajikan informasi pencapaian sasaran, kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi, dan analisis mengenai capaian kinerja. Namun demikian, laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan belum menyajikan informasi keuangan tentang analisis efisiensi yang telah dilakukan dan belum menyajikan informasi keuangan dari setiap sasaran.

Pada aspek evaluasi internal, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Namun, dokumen evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja, perbaikan perencanaan kinerja, dan menilai keberhasilan program.

Pada aspek capaian kinerja, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memiliki target yang dapat dicapai pada tahun berjalan. Namun, belum seluruh capaian terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya serta masih perlu memperbaiki keandalan informasi kinerjanya.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 9. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

Target				Realisasi		Capaian Renstra S.d 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
85	89	98	100	89,8	97,03	97,03

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.010.000.000 termasuk di dalamnya anggaran kegiatan prioritas nasional di bidang kebijakan bidang aparatur sebesar Rp 1.000.000.000. Namun demikian pada saat yang sama terdapat *refocussing* anggaran untuk penanggulangan pencegahan Covid-19 sebesar Rp 1.065.374.000. Sedangkan anggaran yang direalokasi untuk efisiensi sebesar Rp 136.396.000. Total anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2021 setelah *refocussing* dan realokasi sebesar Rp.3.808.230.000.

Persentase realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2021 mencapai 97,03% atau sebesar Rp. 3.695.243.514. Berdasarkan rincian output, realisasi tertinggi adalah RO bimbingan teknis NSPK manajemen ASN wilayah I dan II dengan persentase 100%. Sedangkan paling rendah adalah RO kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian integritas dan moralitas ASN dengan persentase 92,47%

Salah satu faktor tingginya realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah penggunaan metode pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai mekanisme pembayaran anggaran belanja pemerintah ketika pandemi Covid-19 muncul membuat rencana kegiatan yang disusun dapat berjalan lebih cepat tanpa terhambat proses pencairan anggaran yang lebih rumit apabila menggunakan mekanisme pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Lumpsum (LS).

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

IKU 10. PERSENTASE TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN OLEH BPK/INSPEKTORAT

Target				Realisasi		Capaian Renstra S.d 2021
2020	2021	2022	2024	2020	2021	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak ditetapkan menjadi objek pemeriksaan/audit baik oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Objek audit ditentukan dengan melihat peta resiko yang disusun berdasarkan faktor – faktor resiko yaitu jumlah anggaran, eksistensi program prioritas dan anggaran yang mendukung program prioritas tersebut, frekuensi revisi POK, SDM pengelola dan lain-lain. Meskipun Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengampu program prioritas nasional yakni Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Integrasi dan Moralitas ASN, unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak termasuk dalam peta resiko karena program prioritas baru berjalan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, kinerja IKU telah terealisasi 100%.

RENCANA KERJA 2023

WASDAL

KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2023

Mengacu pada rencana kerja pemerintah (RKP) dan renja BKN tahun 2022, dan renstra Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024, sejatinya arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun justru menjadi sebuah *trigger* bagi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan BKN pada umumnya untuk dapat mengakselerasi transformasi/reformasi birokrasi untuk dapat menciptakan proses bisnis yang lebih lincah, efektif, dan efisien. Sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam renstra tahun 2020-2024, arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2022 ialah:

- **Pengawasan dan Pengendalian Terintegrasi.**

Pengawasan dan pengendalian terpadu merupakan kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN secara tersinergi dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara manajemen ASN seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan lain-lain. Potensi tumpang tindih kewenangan, tugas, dan fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu diantisipasi dan dimitigasi dengan menciptakan kolaborasi diantara seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh dari itu, kemitraan BKN dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan instansi pemerintah harus terjalin secara baik dengan tujuan untuk mewujudkan penerapan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan NSPK. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan dan pengendalian terpadu menjadi penting untuk dilaksanakan dari sisi perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan penerima layanan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- **Revitalisasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.**

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan tata kelola terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

STRATEGI

Guna mendukung arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang telah ditetapkan di atas, dengan mengacu pada tujuan dan fokus pengawasan dan pengendalian terpadu serta penguatan implementasi reformasi birokrasi, ditetapkan strategi jangka menengah sebagai berikut:

- **Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Terpadu:**
 - **Optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada seluruh instansi pemerintah**

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dan Peraturan BKN No. 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN, diharapkan kedua regulasi teknis ini dapat menjadi alat bagi BKN khususnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsinya pada tahun-tahun mendatang. Secara kolaboratif, Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN akan dapat menghasilkan data yang akurat serta bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara sendiri untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Terlebih dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB No. 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri PANRB No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, peran untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian bagi BKN menjadi semakin optimal.

- **Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian**

Baik buruknya kualitas pengawasan dan pengendalian dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya ialah seberapa besar jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh PPK/instansi pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin tingginya jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh PPK atau instansi pemerintah, maka semakin baik pula kualitas suatu tindakan pengawasan dan pengendalian. Gelombang pengaduan masyarakat atas permasalahan di bidang kepegawaian juga tidak dapat dibendung jumlahnya, oleh karena itu Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga harus mampu memfasilitasi hal tersebut melalui mekanisme yang efektif dan efisien.

- **Revitalisasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi:**

- **Peningkatan Profesionalisme ASN**

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang keahlian yang diperlukan oleh sumber daya manusia di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme.

- **Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar**

Pemanfaatan sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; c. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah; dan d. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip.

- **Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran**

Strategi penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; dan c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit kerja.

- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Strategi penguatan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; 2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PROGRAM PRIORITAS

Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan manajemen ASN, memiliki kewajiban untuk melakukan revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter selaras dengan rencana pemerintah dalam pembangunan kualitas SDM, khususnya ASN di Indonesia. Oleh karena itu, dalam agenda pembangunan strategis yang dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah mencanangkan sejumlah program prioritas (PP) yang dirinci dalam kegiatan prioritas (KP) dan proyek prioritas (KP). Melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, BKN ditugaskan untuk melaksanakan proyek prioritas **Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter** melalui kegiatan **Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif** dan dilaksanakan dalam proyek **Penegakan Disiplin PNS**. Berdasarkan hasil *trilateral meeting* yang dilakukan antara BKN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, pemerintah melalui BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan target untuk menyusun **Rekomendasi Kebijakan Atas Hasil Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Disiplin**. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia.

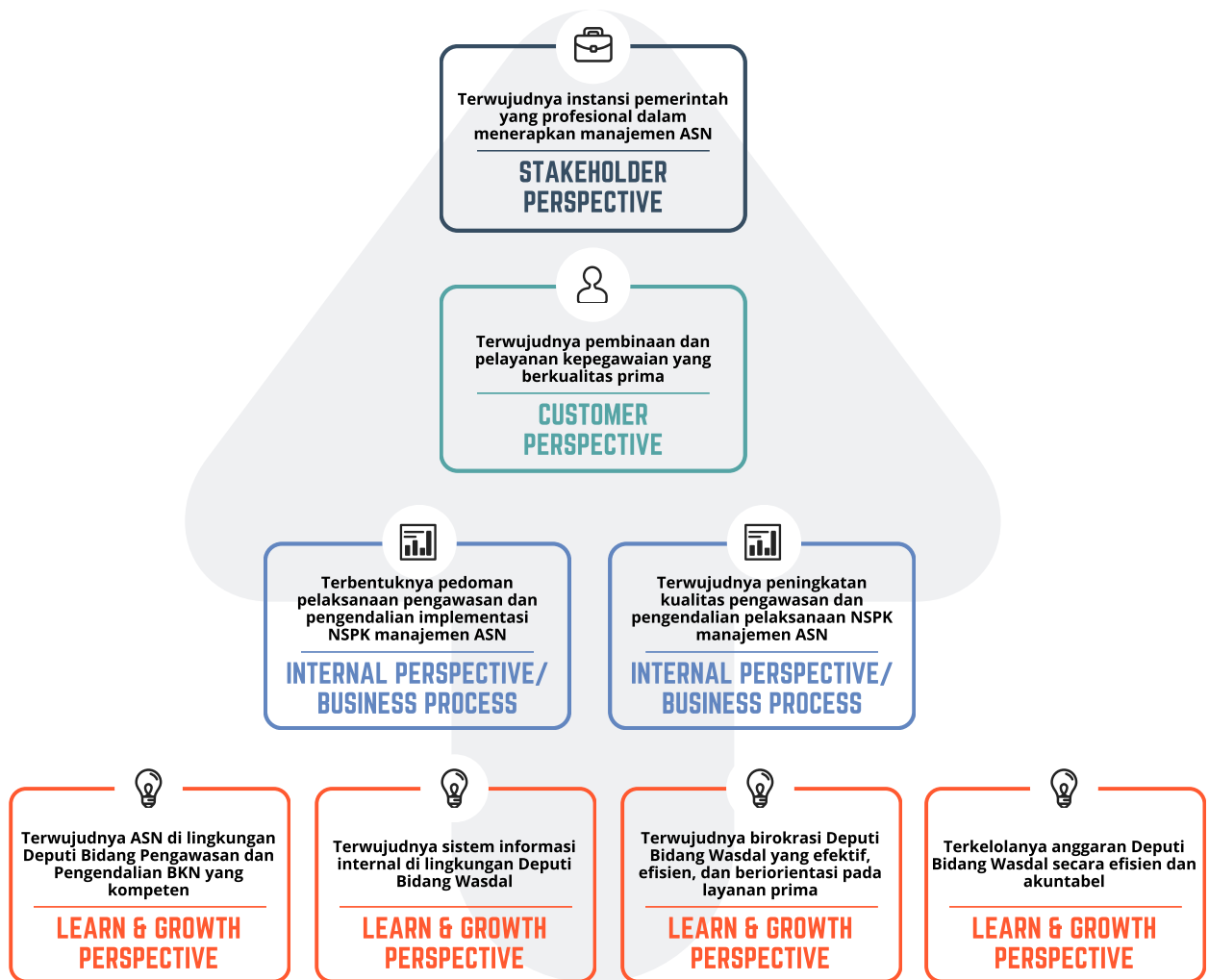
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

Untuk dapat mewujudkan tujuan strategis, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menentukan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan menggunakan metode *balance scorecard* (BSC), sasaran strategis yang akan dicapai dilihat dari empat sudut pandang (perspektif):

- Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*).
Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan adalah terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN yang diukur melalui indikator kinerja “persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK”.
- Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan (*customer perspective*).
Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan adalah terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat.
- Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis (*internal perspective/business process*).
Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilihat melalui: terselesaikannya pengaduan atas permasalahan kepegawaian ASN; dan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti.
- Sasaran strategis dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*).
Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*), sasaran yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang adalah:
 - terwujudnya ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang kompeten yang diukur melalui indeks profesionalitas ASN;
 - terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang diukur melalui indikator kinerja persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar;

- o terwujudnya birokrasi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Sasaran tersebut diukur dengan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- o terkelolanya anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efisien dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur dengan persentase realisasi anggaran dan persentase tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat.



Peta Strategi Deputy Bidang Wasdal Tahun 2020-2024

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 1. PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN ASN SESUAI NSPK

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
8%	34%	N/A	60%	60%	1.610.572.000

Pada tahun 2021, pengawasan dan pengendalian masih sulit dilakukan karena belum adanya peraturan yang menguatkan pelaksanaan indikator ini. Pada tahun 2022, BKN sudah mengupayakan penguatan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK. Ada 4 hal yang menjadi dasar penguatan ini diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Pada peraturan ini dijelaskan metode pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan adalah dengan metode preventif dan represif.
2. Dalam rangka pelaksanaan penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN ini, BKN sudah menyusun pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK manajemen ASN. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan instansi pemerintah dapat memenuhi seluruh data pendukung yang dibutuhkan.
3. Pengembangan aplikasi Indeks NSPK ke versi 2.0 yang lebih *user friendly* sudah dilakukan sehingga memudahkan BKN dan seluruh instansi pemerintah dalam melakukan penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN.
4. Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Kantor Regional sebagai perpanjangan tangan BKN ke instansi daerah di wilayah kerjanya.

Dengan adanya 4 poin yang menjadi penguat dalam pelaksanaan indeks implementasi NSPK manajemen ASN, pada tahun 2023 BKN menetapkan target 60%.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WARDAL	RENJA	
83,39	86,04	N/A	89	89	0

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat 86,04 dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 86. oleh karena itulah pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan menetapkan target kinerja sesuai dengan target kinerja yang ada di Rencana Strategis Deputi Bidang Wasdal Tahun 2020-2024 yaitu 89.

IKU 3. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN ASN

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WARDAL	RENJA	
100%	100%	N/A	100%	100%	0

Pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024, indikator kinerja "**Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN**" ditetapkan stagnan yakni 100%. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menginginkan setiap pengaduan permasalahan yang masuk ke auditor kepegawaian, harus diselesaikan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan bahwa indikator kinerja "Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN" ditetapkan memiliki target kinerja 100%

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 4. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG DITINDAKLANJUTI

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
60%	89%	N/A	95%	95%	0

Pada tahun 2021, capaian kinerja pada indikator kinerja "Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti" telah tercapai dengan capaian kinerja mencapai 89% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 65%. Oleh karena itulah pada tahun 2023, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan target kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 95%.

Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian optimis untuk menetapkan target kinerja yang cukup tinggi dikarenakan pada Bulan September 2022, Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara telah disahkan. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, instansi pemerintah dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

IKU 5. PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN/PEMINDAHAN/PEMBERHENTIAN/PROMOSI/MUTASI KEPEGAWAIAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENGALAMI KEKOSONG PPK YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
N/A	N/A	N/A	100%	100%	0

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kewenangan yang diberikan oleh Perpres 116 Tahun 2022 tersebut membuat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menambahkan indikator kinerja baru dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu **"PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN/PEMINDAHAN/PEMBERHENTIAN/PROMOSI/MUTASI KEPEGAWAIAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENGALAMI KEKOSONG PPK YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"**. Target kinerja ini bertujuan untuk membantu mengukur kinerja tugas dan fungsi yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan pengendalian melalui Perpres 116 Tahun 2022.

IKU 6. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI LINGKUP KEDEPUTIAN BIDANG WASDAL

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
75,10	78,92	N/A	80	80	255.000.000

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah mencapai target kinerja untuk indikator kinerja **"Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputian Bidang Wasdal"** yakni 78,92 dari target kinerja sebesar 78. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan trend realisasi kinerja terhadap indikator kinerja ini, maka Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan bahwa target kinerja untuk **"Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputian Bidang Wasdal"** sebesar 80.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 7. PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI YANG TERSTANDAR

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDA;	RENJA	
95,10	100%	N/A	100	100	0

Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk indikator "**Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar**" pada tahun 2021 sebesar 100% dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun 2023, target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan hasil review Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024 tetap pada nilai 100%.

IKU 8. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
32,74	34,12	N/A	35	35	0

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan target kinerja pada indikator kinerja "**Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi**" sebesar 33 dan capaian kinerja terhadap indikator tersebut pada tahun 2021 adalah 34,12 atau telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan pengendalian menetapkan bahwa target kinerja untuk Indikator kinerja "**Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi**" adalah sebesar 35.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 9. SKOR ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
70,19	74,56	N/A	79	79	0

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap unit kerja Eselon I, terdapat tren kenaikan terhadap skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada periode Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.

Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah memberikan rekomendasi kepada unit kerja antara lain sebagai berikut:

1. Renstra memuat alasan logis tentang penetapan target kinerja dari masing-masing IKU;
2. Mendokumentasikan hasil monitoring dan tindak lanjut kinerja;
3. Memantau/memonitor capaian kinerja secara berkala berdasarkan target yang ditetapkan dalam rencana aksi;
4. Memanfaatkan capaian target kinerja untuk penilaian pemberian *reward dan punishment*;
5. Menyusun dokumentasi Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
6. Agar evaluasi Rencana Aksi di komunikasikan dengan pihak berkepentingan;
7. Melaksanakan monitoring dan pencapaian target kinerja secara berjenjang;
8. Capaian Kinerja dikaitkan dengan pemberian *reward dan punishment*;
9. Mendokumentasikan hasil reuik IKU dalam upaya menunjukkan perbaikan;

Menindaklanjuti rekomendasi di atas terkait dengan target capaian tahun 2023, bahwa untuk target atas Skor hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2023 ditetapkan sebesar 79 dengan mempertimbangkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 75.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

IKU 10. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
89.8%	97,03%	N/A	100%	100%	0

Pada tahun 2021, capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk indikator kinerja "**Persentase Realisasi Anggaran**" mencapai 97,03 atau melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yakni 89%. Salah satu faktor tingginya persentase realisasi anggaran adalah metode pencairan anggaran pada tahun 2021 yang menerapkan sistem Tambahan Uang Persediaan (TUP). Oleh karena itu, dikarenakan capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian melebihi target kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2023, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan "Persentase Realisasi Anggaran" memiliki target kinerja sebesar 100%.

IKU 11. PERSENTASE TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN OLEH BPK/INSPEKTORAT

REALISASI			TARGET 2023		ANGGARAN 2023
2020	2021	S.D TW III 2022	RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	N/A	100%	100%	0

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian bukan menjadi salah satu objek pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dikarenakan bukan termasuk dalam peta resiko kedua instansi pemerintah.

Berdasarkan rencana strategis Kedepuitan Bidang Wasdal tahun 2020-2024, target IKU ini dalam kurun waktu 5 tahun adalah 100% setiap tahunnya. Sehingga dengan telah tercapainya target sampai dengan tahun 2021, maka target kinerja tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Oleh karena itulah, yang perlu dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah menjaga konsistensi agar dapat tercapai kembali pada tahun-tahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA REFORM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PK REFORM
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS 1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Professional Dalam Menerapkan Manajemen ASN	IKU 1	Persentase Instansi Pemerintah Yang Telah Mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai NSPK	1. Penerapan Aplikasi Indeks 2.0 2. Penyederhanaan Indikator Indeks NSPK 3. Penyempurnaan POS AP Penilaian Indeks NSPK
COSTUMER PERSPECTIVE				
SS2	Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian Yang Berkualitas	IKU2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyempurnaan Instrumen survei dan penambahan frekuensi Survei

PERJANJIAN KINERJA REFORM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PK REFORM
INTERNA PROCCES PERSPECTIVE				
SS3	Terwujudnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN	IKU 3	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi dewasdal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan permasalahan kepegawaian dalam melibatkan kantor regional 2. Penerapan reward and punishment berbasis aplikasi dewasdal
		IKU 4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan database tindaklanjut hasil wasdal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 2. Penerapan tindakan administratif dalam mendorong dalam mendorong tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan pengendalian
		IKU5	Persentase Pertimbangan Teknis Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Promosi/Mutasi Kepegawaian Instansi Pemerintah Yang Mengalami Kekosongan PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan seluruh unit terkait, proses cepat/tepat waktu dan hasil akurat 2. Penyusunan POS AP Pemberian Pertimbangan Pertek Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Promosi/Mutasi Kepegawaian Instansi Pemerintah Yang Mengalami Kekosongan PPK

PENUTUP

WASDAL

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2020-2024 Perubahan, yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran. Untuk itu dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pada tahun 2023 perlu diambil langkah-langkah yang strategis dan optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN

WASDAL

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										140.602,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								140.602,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah IV								000 - Bukan Tematik		584.852,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										18.750,0
		Pusat	Pusat								18.750,0
	052 - Pelaksanaan										494.402,0
		Pusat	Pusat								494.402,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										71.700,0
		Pusat	Pusat								71.700,0
02.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur										1.000.000,0
02.PBQ.002	Penegakan Disiplin ASN				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Transformasi Manajemen SDM Aparatur	Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding	000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										270.955,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								270.955,0
	052 - Pelaksanaan										564.585,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								564.585,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										164.460,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								164.460,0
Total											12.410.769,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN				8.889.319,0				12.013.041,0	12.579.820,0	12.198.426,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		8.889.319,0				12.013.041,0	12.579.820,0	12.198.426,0
01.BDB.001	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I	398	Lembaga		1.843.882,0	356	356	356	1.517.842,0	1.619.842,0	1.721.842,0
01.BDB.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	6.000,0	6.000,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	11.000,0	12.000,0
01.BDB.001.052	Pelaksanaan	262,0	Lembaga	5.694,2	1.491.882,0	262,0	262,0	262,0	1.157.842,0	1.257.842,0	1.357.842,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.BDB.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	2,0	Layanan	173.000,0	346.000,0	2,0	2,0	2,0	350.000,0	351.000,0	352.000,0
01.BDB.002	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II	321	Lembaga		2.081.818,0	321	321	321	3.614.737,0	3.984.611,0	3.403.318,0
01.BDB.002.051	Perencanaan dan Persiapan	2,0	Layanan	67.175,0	134.350,0	2,0	2,0	2,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.BDB.002.052	Pelaksanaan	321,0	Lembaga	3.549,9	1.139.521,0	321,0	321,0	282,0	3.544.737,0	3.914.611,0	3.333.318,0
01.BDB.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	2,0	Layanan	403.973,5	807.947,0	2,0	2,0	2,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.BDB.003	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III	335	Lembaga		2.506.837,0	335	335	335	3.991.783,0	4.058.160,0	4.126.605,0
01.BDB.003.051	Perencanaan dan Persiapan	2,0	Layanan	31.722,5	63.445,0	1,0	1,0	1,0	78.745,0	78.745,0	78.745,0
01.BDB.003.052	Pelaksanaan	211,0	Lembaga	9.795,0	2.066.735,0	179,0	179,0	179,0	3.464.531,0	3.530.908,0	3.599.353,0
01.BDB.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	32,0	Layanan	11.770,5	376.657,0	31,0	31,0	31,0	448.507,0	448.507,0	448.507,0
01.BDB.004	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah IV	216	Lembaga		2.456.782,0	218	218	218	2.888.679,0	2.917.207,0	2.946.661,0
01.BDB.004.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	18.750,0	0,0	0,0	0,0	100.660,0	102.035,0	103.479,0
01.BDB.004.052	Pelaksanaan	86,0	Lembaga	19.968,4	1.717.283,0	86,0	86,0	86,0	2.134.439,0	2.152.865,0	2.171.712,0
01.BDB.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	720.749,0	0,0	0,0	0,0	653.580,0	662.307,0	671.470,0
02	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN				3.521.450,0				7.251.309,0	7.538.038,0	7.948.243,0
02.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga/ Laporan/ Badan Usaha/ Penyalur/ Keputusan		2.521.450,0				7.251.309,0	7.538.038,0	7.948.243,0
02.BIC.001	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah I	100	Lembaga		635.987,0	125	125	0	2.320.000,0	2.372.000,0	2.424.000,0
02.BIC.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	171.750,0	171.750,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	11.000,0	12.000,0
02.BIC.001.052	Pelaksanaan	179,0	Lembaga	2.209,0	395.417,0	179,0	179,0	179,0	2.300.000,0	2.350.000,0	2.400.000,0
02.BIC.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	68.820,0	68.820,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	11.000,0	12.000,0
02.BIC.002	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah II	162	Lembaga		803.175,0	162	162	162	2.347.309,0	2.582.038,0	2.840.243,0
02.BIC.002.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	29.100,0	29.100,0	1,0	1,0	1,0	82.968,0	91.264,0	100.391,0
02.BIC.002.052	Pelaksanaan	162,0	Lembaga	2.571,5	416.575,0	162,0	162,0	162,0	2.142.158,0	2.356.373,0	2.592.011,0
02.BIC.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	357.500,0	357.500,0	1,0	1,0	1,0	122.183,0	134.401,0	147.841,0
02.BIC.003	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah III	163	Lembaga		497.436,0	163	163	163	1.050.000,0	1.050.000,0	1.150.000,0
02.BIC.003.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	117.125,0	117.125,0	1,0	1,0	1,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
02.BIC.003.052	Pelaksanaan	163,0	Lembaga	1.470,6	239.709,0	163,0	163,0	163,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.100.000,0
02.BIC.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	140.602,0	140.602,0	1,0	1,0	1,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah IV	71	Lembaga		584.852,0	71	71	71	1.534.000,0	1.534.000,0	1.534.000,0
02.BIC.004.051	Perencanaan dan Persiapan	0,0	Layanan	Infinity	18.750,0	0,0	0,0	0,0	19.000,0	19.000,0	19.000,0
02.BIC.004.052	Pelaksanaan	0,0	Lembaga	Infinity	494.402,0	0,0	0,0	0,0	1.458.000,0	1.458.000,0	1.458.000,0
02.BIC.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	0,0	Layanan	Infinity	71.700,0	0,0	0,0	0,0	57.000,0	57.000,0	57.000,0
02.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		1.000.000,0				0,0	0,0	0,0
02.PBQ.002	Penegakan Disiplin ASN	1	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BIC.003.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	117.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.125,0
02.BIC.003.052	Pelaksanaan	Utama	239.709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.709,0
02.BIC.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	140.602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.602,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah IV		584.852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584.852,0
02.BIC.004.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	18.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.750,0
02.BIC.004.052	Pelaksanaan	Utama	494.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494.402,0
02.BIC.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	71.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71.700,0
02.PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.PBQ.002	Penegakan Disiplin ASN		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.PBQ.002.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	270.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.955,0
02.PBQ.002.052	Pelaksanaan	Utama	564.585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564.585,0
02.PBQ.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	164.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164.460,0
Total			12.410.769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.410.769,0

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian



Ditandatangani Secara Elektronik
Dr. OTOK KUSWANDARU, S.Sos., M.Si

